

**FORMAT PEMERINTAHAN
DAERAH MENURUT
UU 32/2004**

***(DALAM RANGKA PEMANTAPAN
SISTEM PEMERINTAHAN RI)***

OLEH:

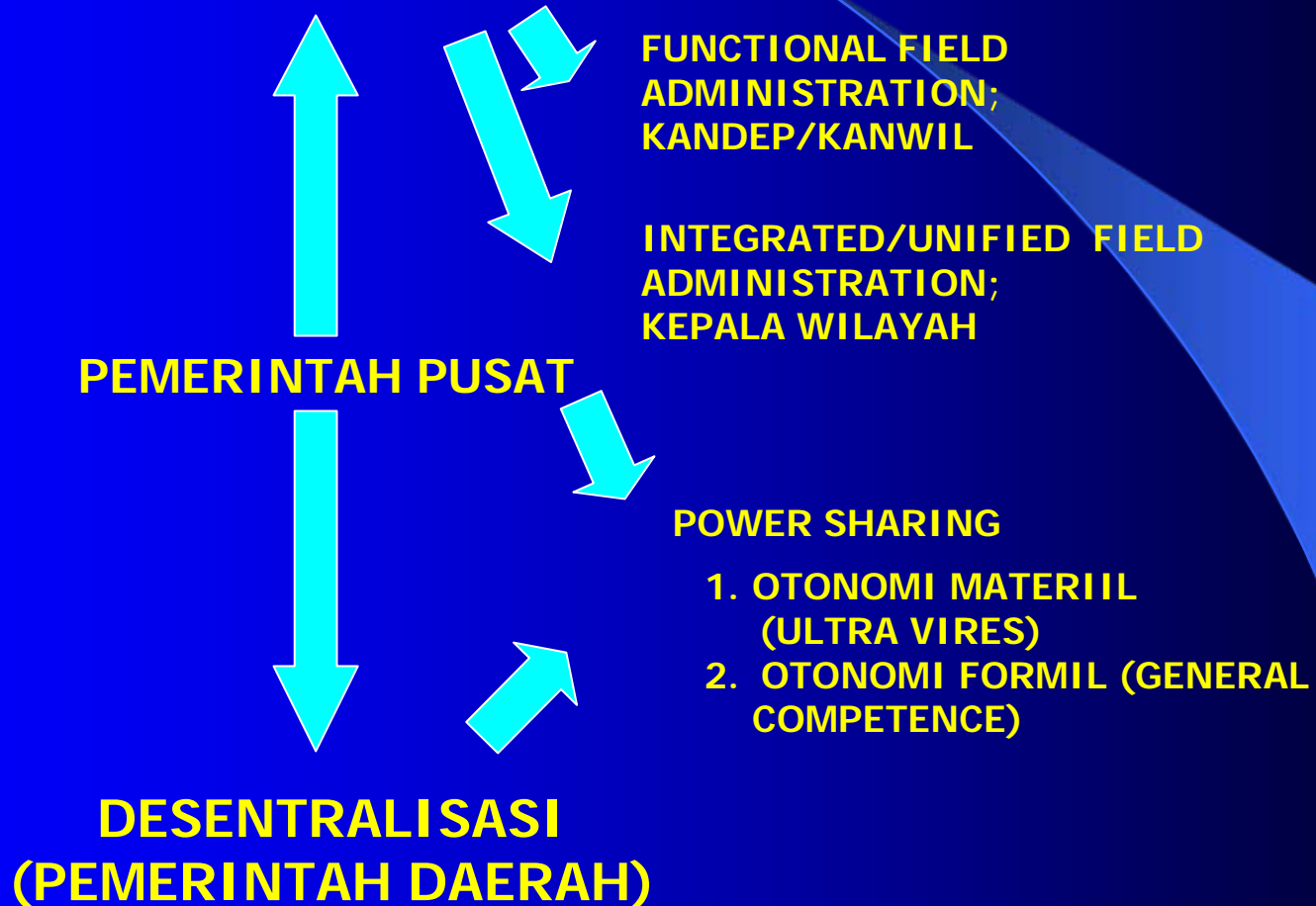
DR.MADE SUWANDI Msoc.sc

**DIREKTUR URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

DITJEN OTDA - DEPDAGRI

MENGAPA KITA MEMERLUKAN PEMERINTAH DAERAH ??

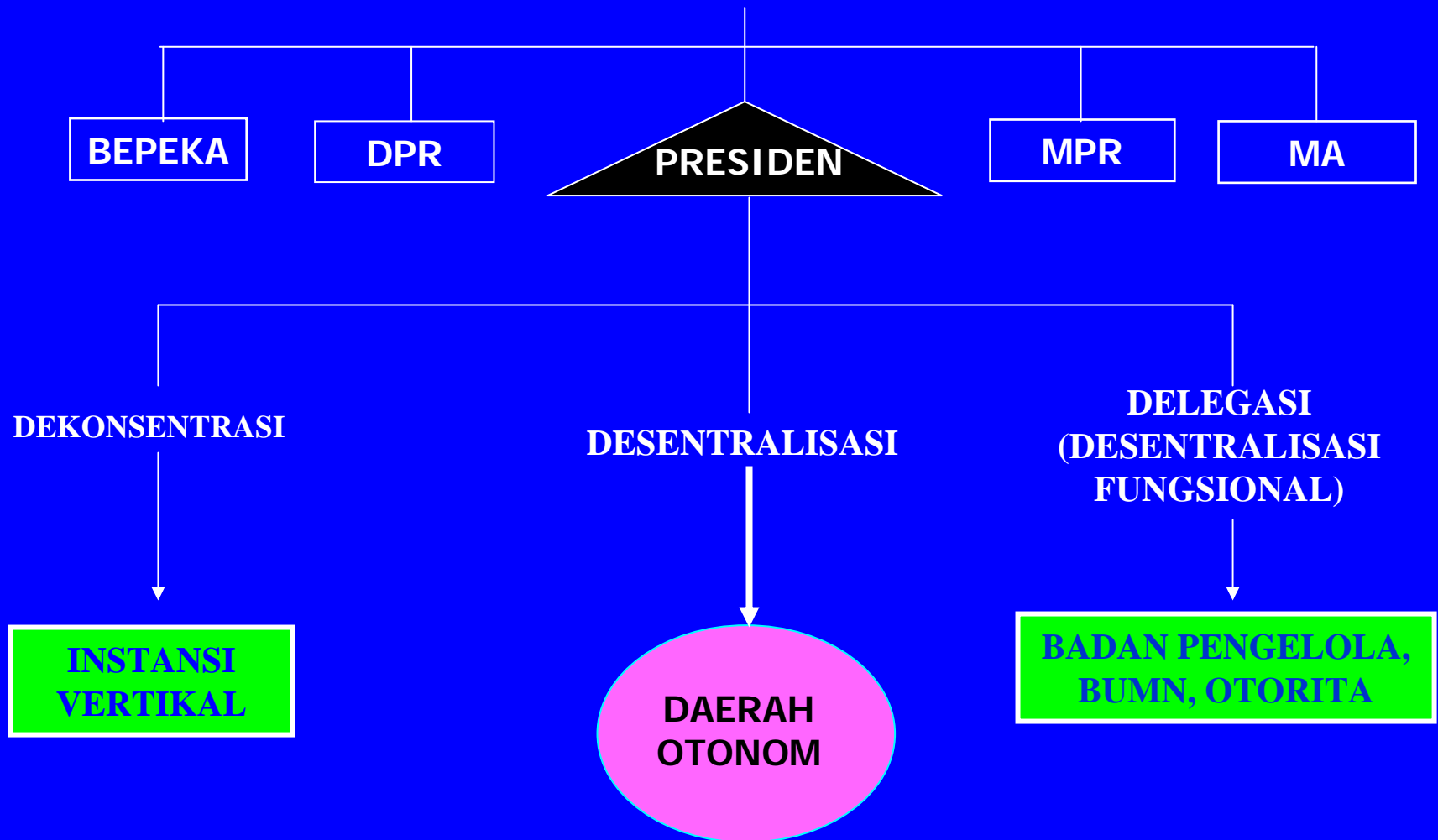
DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)



PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN



DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN



TUJUAN DESENTRALISASI

**KEBIJAKAN
DESENTRALISASI**

**PEMERINTAH
DAERAH**

**PELAYANAN
PUBLIK**

Akuntabel
Efektif
Efisien
Ekonomis

🔴 Tujuan Politis

🔴 Tujuan
Kesejahteraan

APA ITU OTONOMI LUAS ?



KEBIJAKAN DESENTRALISASI DARI WAKTU KE WAKTU

2002 ?

UU 22 / 1999
desentralisasi dominan

UU 5 / 1974
dekonsentrasi dominan

UU 18 / 1965
desentralisasi dominan

PENPRES 6 / 1959
dekonsentrasi dominan

UU 1 / 1957
desentralisasi dominan

UU 22 / 1948
desentralisasi dominan

UU 1 / 1945
dekonsentrasi dominan

DESENTRALISATIE WET 1903
dekonsentrasi dominan



HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM

PEMERINTAH PUSAT

TERGANTUNG & SUBORDINASI

DAERAH OTONOM
PROVINSI

DAERAH OTONOM
KAB / KOTA

**PERAN GUBERNUR
SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH**

**GUBERNUR
(WAKIL PEMERINTAH)**

**Pembinaan,
Pengawasan,
Supervisi,
Monev
Fasilitasi**

**Kab/Kota
melaksanakan Otda**

**PELAYANAN
OPTIMAL**

ELEMEN DASAR PEMERINTAH DAERAH

1. KEWENANGAN
2. KELEMBAGAAN
3. PERSONIL
4. KEUANGAN DAERAH
5. PERWAKILAN
6. PELAYANAN PUBLIK
7. PENGAWASAN

PENATAAN KEWENANGAN

- **FILOSOFI OTONOMI DAERAH:**
- **EKSISTENSI PEMDA ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SECARA DEMOKRATIS**
- **SETIAP KEWENANGAN YANG DISERAHKAN KE DAERAH HARUS MAMPU MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DAN DEMOKRASI**
- **KESEJAHTERAAN DICAPAI MELALUI PELAYANAN PUBLIK**
- **PELAYANAN PUBLIK ADA YANG BERSIFAT PELAYANAN DASAR (BASIC SERVICES) DAN ADA YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN (CORE COMPETENCE)**
- **CORE COMPETENCE MERUPAKAN SINTHESIS DARI PDRB, EMPLOYMENT DAN PEMANFAATAN LAHAN**

PENATAAN KEWENANGAN.....

- **PELAYANAN PUBLIK MENGHASILKAN OUTPUTS; PUBLIC GOODS DAN PUBLIC REGULATIONS**
- **PUBLIC GOODS; JALAN, JEMBATAN, SEKOLAH, RUMAH SAKIT, PASAR, TERMINAL, IRIGASI DLL**
- **PUBLIC REGULATIONS; AKTE PERKAWINAN, AKTE KELAHIRAN, KTP, KK, IMB, HO, SERTIFIKAT TANAH DLL**
- **PERTANYAAN:**

APAKAH PEMDA SUDAH MENGHASILKAN PUBLIC GOODS DAN PUBLIC REGULATIONS YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN RAKYAT YAITU; PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN ??????

PENATAAN KEWENANGAN.....

- **KEWENANGAN:**
 1. **KEWENANGAN ABSOLUT (DISTINCTIVE); HANYA DIMILIKI PUSAT; HANKAM, LUAR NEGERI, AGAMA, MONETER, PERADILAN DAN POLITIK LUAR NEGERI**
 2. **KEWENANGAN BERSAMA (CONCURRENT); DIKERJAKAN BERSAMA ANTARA PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**
 3. **KEWENANGAN CONCURRENT ADA YANG BERSIFAT WAJIB (OBLIGATORY) DAN ADA YANG BERSIFAT OPTIONAL (CORE COMPETENCE)**
 4. **KEWENANGAN WAJIB DIKUTI OLEH SPM**

PENATAAN KEWENANGAN.....

KRITERIA PEMBAGIAN KEWENANGAN:

- 1. EKSTERNALITAS; SIAPA KENA DAMPAK DIA YANG BERWENANG MENGURUS**
- 2. AKUNTABILITAS; YANG BERWENANG MENGURUS ADALAH UNIT PEMERINTAHAN YANG PALING DEKAT DENGAN DAMPAK TERSEBUT**
- 3. EFISIENSI; BAHWA OTONOMI HARUS MENCIPTAKAN EFISIENSI DENGAN MEMPERHATIKAN ECONOMIES OF SCALE. UNTUK ITU PERLU MEMPERTIMBANGKAN CATCHMENT AREA PELAYANAN**

ADANYA INTER-RELASI DAN INTER-DEPENDENSI ANTAR TINGKATAN PEMERINTAHAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN MASING-MASING

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

- Hankam
- Moneter
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama

CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)

Contoh: pertanian,
industri, perdagangan,
pariwisata, kelautan dsb

WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)

Contoh: kesehatan,
pendidikan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan

SPM
(Standar Pelayanan Minimal)

PENATAAN KELEMBAGAAN

- **KELEMBAGAAN ADALAH UNTUK MENAKOMODASIKAN KEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH**
- **KELEMBAGAAN UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN**
- **RIGHT SIZING DENGAN MEMPERTIMBANGKAN REINVENTING GOVERNMENT; PRIVATISASI (BOO, BOT, BTO, BOL DLL)**
- **SUSUN STRATEGI KELEMBAGAAN MASA TRANSISI AKIBAT TEKANAN BIROKRASI YANG TERLALU BANYAK**
- **KEJELASAN TUPOKSI CAMAT, KEPALA DESA, DAN HUBUNGAN KERJANYA**
- **KESEIMBANGAN ANTARA STRATEGIC APEX, MIDDLE LINE, OPERATING CORE, SUPPORT STAFF DAN TECHNO STRUCTURE;**

PENATAAN PERSONIL

- **TENTUKAN STANDARD KOMPETENSI UNTUK SETIAP JABATAN**
- **LAKUKAN REKRUTMEN, PROMOSI, MUTASI BERBASIS STANDARD KOMPETENSI**
- **PENGEMBANGAN PEGAWAI & TRAINING BERBASIS NEED ASSESSMENT UNTUK MEMENUHI STANDARD KOMPETENSI YANG DITETAPKAN**
- **TENTUKAN MINIMAL PERFORMANCE YANG HARUS DICAPAI PEGAWAI**
- **ADANYA KEJELASAN ANTARA POSISI PEJABAT KARIR DENGAN PEJABAT POLITIK**
- **MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERPADUAN ANTARA SEPARATED DAN INTEGRATED SYSTEM**
- **PNS MASIH DIANGGAP SEBAGAI ALAT PEREKAT BANGSA**

PENATAAN KEUANGAN DAERAH

- **PENERAPAN PRINSIP MONEY FOLLOWS FUNCTIONS**
- **PENATAAN COST CENTRES DAN REVENUES CENTRES**
- **PENATAAN COST CENTRES DENGAN MENENTUKAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN APA YANG DILAKUKAN DAERAH**
- **DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN SSA DARI SETIAP PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN**
- **AKAN TERDETEKSI BIAYA SETIAP PELAYANAN**
- **DENGAN CARA YANG SAMA DAPAT DIHITUNG BIAYA SELURUH PELAYANAN YANG MERUPAKAN “FISCAL NEED DARI DAERAH”**
- **SELANJUTNYA MENATA REVENUE CENTRES**

PENATAAN KEUANGAN DAERAH.....

PENATAAN REVENUE CENTRES:

- 1. DESENTRALISASI FISKAL; PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**
- 2. ADANYA GEJALA HORIZONTAL INEQUALITY KARENA PERBEDAAN TAX BASE ANTARA KOTA DENGAN KABUPATEN DAN PERBEDAAN SDA**
- 3. LAKUKAN INTENSIFIKASI DAN EXTENSIFIKASI DENGAN MEMPERHATIKAN CANONS OF TAXATIONS**
- 4. LAKUKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH; CIPTAKAN KONDISI MENARIK UNTUK INVESTOR, LAKUKAN KEMITRAAN, GALI POTENSI DAERAH, BUMD, KEMBANGKAN USAHA KECIL**
- 5. AKAN TERDETEKSI FISKAL CAPACITY**

PENATAAN KEUANGAN DAERAH.....

PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH:

- **PERBANDINGAN ANTARA FISCAL CAPACITY DENGAN FISCAL NEED AKAN TERDETEKSI FISCAL GAP (DEFISIT FISCAL)**
- **FISCAL GAP SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN PERIMBANGAN KEUANGAN MELALUI SUBSIDI**
- **SUBSIDI (GRANT) BERPERAN SEBAGAI EQUALIZER UNTUK MENCIPTAKAN EQUALIZATION EFFECTS**
- **DEFISIT SPECIFIC/KHUSUS AKAN MEMERLUKAN SUBSIDI KHUSUS (SPECIFIC GRANT) ATAU DAK**
- **DEFISIT UMUM MEMERLUKAN SUBSIDI UMUM (BLOCK GRANT) ATAU DAU**

PENATAAN PERWAKILAN

- **HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF**
- **POSISI PERANGKAT DAERAH YANG NETRAL**
- **RENCANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG**
- **HUBUNGAN CHECKS AND BALANCES ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN DPRD**
- **KEMUNGKINAN IMPEACHMENT DPRD DAN KEPALA DAERAH**
- **ADANYA MEKANISME “RECALL” OLEH PARPOL DAN BADAN KEHORMATAN DPRD**
- **PENGGANTIAN LPJ DENGAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN**
- **POSISI KEUANGAN DPRD**

PENATAAN PELAYANAN PUBLIK

- **PELAYANAN DASAR MENGACU PADA SPM**
- **DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN:**
 - 1 **BIAYA PELAYANAN**
 - 2 **KEBUTUHAN SOTK**
 - 3 **KEBUTUHAN PERSONIL**
 - 4 **ANGGARAN KINERJA**
 - 5 **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMDA KEPADA RAKYAT**
 - 6 **OBJEKTIVITAS LPJ KEPALA DAERAH KE DPRD**
 - 7 **FASILITASI PUSAT TERHADAP DAERAH**
 - 8 **PENGAWASAN DAN SUPERVISI TERHADAP DAERAH**
 - 9 **PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

PENATAAN PENGAWASAN

- 1. RANCUNYA PEMBAGIAN PENGAWASAN ANTARA PENGAWASAN INTERNAL DAN EXTERNAL**
- 2. TERLALU BANYAKNYA UNIT PENGAWASAN; EXTERNAL, INTERNAL, PENGAWASAN DPRD**
- 3. LEMAHNYA MEKANISME CHECKS AND BALANCES KARENA BELUM TERBENTUKNYA CIVIL SOCIETY**
- 4. TIDAK ADANYA MEKANISME REWARD AND PUNISHMENT**
- 5. TIDAK JELASNYA INTERFACE DEPDAGRI SEBAGAI PEMBINA UMUM DENGAN DEPARTEMEN/LPND SEBAGAI PEMBINA TEHNIS**

TERIMA KASIH

